Journal of Economics
AND MANAGEMENT SCIENTIES
https://jems.ink
ISSN 2655-1934 (print), 2655-6685 (online)

Pengaruh Temuan Audit, Jumlah Kasus, Nilai Kerugian, Penyelesaian TLRHP terhadap Opini Audit

Kartika Ari Andini[1], Muhsin[2], Haryono[3], dan Muhammad Fahmi[4]*

[1,2,3,4] *Universitas Tanjungpura, Indonesia*

Journal of Economics and Management Scienties is licensed under a Creative Commons 4.0 International License.

ARTICLE HISTORY
Received: 09 November 26
Final Revision: 13 November 26
Accepted: 25 November 26
Online Publication: 31 December 26

KEYWORDS
Audit Findings, Loss Cases, Loss Amounts, Audit Recommendation Follow-up Completion, Local Government Audit Opinion

CORRESPONDING AUTHOR
kartikariandini@gmail.com

DOI
10.37034/jems.v9i1.596

A B S T R A C T

Reliable financial reporting is essential for public accountability, but audit opinions may reflect different dimensions of financial management. This study examines the effects of audit findings, loss cases, loss amounts, and completion of audit recommendation follow-ups on local government audit opinions in West Kalimantan Province. A quantitative explanatory approach was applied to secondary data comprising 120 observations from reports issued by the Audit Board of the Republic of Indonesia. Multiple linear regression was used, supported by descriptive statistics and tests of normality, multicollinearity, heteroscedasticity, and autocorrelation. Hypotheses were assessed using partial and simultaneous tests at a five percent significance level. Audit findings, loss cases, and loss amounts showed no significant effects, whereas follow-up completion had a significant negative association with audit opinions. The overall model was significant and explained twelve percent of the variation in audit opinions. These findings indicate the need to evaluate the substance and context of corrective actions, rather than completion rates alone, while strengthening internal controls and accountability in regional financial management across local government entities.

KATA KUNCI
Temuan Audit, Kasus Kerugian, Nilai Kerugian, Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Audit, Opini Audit Pemerintah Daerah

A B S T R A K

Akuntabilitas keuangan daerah memerlukan laporan yang andal serta tindak lanjut pemeriksaan yang efektif. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh temuan audit, jumlah kasus kerugian, nilai kerugian daerah, dan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap opini audit pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori dengan data sekunder berupa 120 observasi yang bersumber dari laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Analisis dilakukan menggunakan regresi linear berganda, didukung statistik deskriptif serta pengujian normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Pengujian hipotesis menggunakan uji parsial dan simultan pada tingkat signifikansi lima persen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa temuan audit, jumlah kasus kerugian, dan nilai kerugian daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit. Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan memiliki hubungan negatif yang signifikan dengan opini audit. Secara simultan, model penelitian signifikan dan menjelaskan dua belas persen variasi opini audit. Temuan ini mengimplikasikan perlunya evaluasi substansi perbaikan dan konteks penyelesaian rekomendasi, disertai penguatan pengendalian internal serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Tingkat penyelesaian administratif perlu ditelaah bersama kualitas perbaikan yang dihasilkan pemerintah daerah.

1. Pendahuluan

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik merupakan salah satu prinsip utama dalam penerapan *good governance*. Pemerintah daerah sebagai entitas publik memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya keuangan yang berasal dari masyarakat melalui penyajian laporan keuangan yang berkualitas dan dapat dipercaya [1]. Akuntabilitas keuangan pemerintah daerah menjadi aspek penting karena pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan administratif, tetapi juga mencerminkan efektivitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik dan mencapai tujuan pembangunan daerah [2].

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan salah satu instrumen utama dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Melalui LKPD, masyarakat, pemerintah pusat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta pemangku kepentingan lainnya dapat memperoleh informasi mengenai kondisi keuangan dan kinerja pengelolaan anggaran pemerintah daerah [3]. Akuntabilitas menuntut pemerintah memberikan

penjelasan dan pertanggungjawaban atas tindakannya kepada forum yang berwenang menilai kinerjanya [4].

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk laporan keuangan pemerintah daerah [5]. Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam bentuk opini audit yang menunjukkan tingkat kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan [6]. Opini audit BPK menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kualitas tata kelola keuangan pemerintah daerah. Kecukupan pengungkapan juga perlu diperhatikan karena penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa karakteristik pemerintah daerah berkaitan dengan variasi tingkat pengungkapan LKPD [7]. Meskipun demikian, opini WTP tidak secara otomatis menunjukkan bahwa suatu pemerintah daerah bebas dari seluruh permasalahan pengelolaan keuangan, karena opini audit hanya memberikan keyakinan memadai atas kewajaran laporan keuangan, bukan jaminan bahwa seluruh aktivitas pemerintahan telah berjalan tanpa penyimpangan [8].

Dalam praktiknya, kualitas opini audit pemerintah daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah keberadaan temuan audit. Temuan audit merupakan kondisi yang ditemukan auditor berdasarkan hasil pemeriksaan yang menunjukkan adanya perbedaan antara kondisi aktual dengan kriteria atau standar yang telah ditetapkan [8]. Temuan audit dapat berupa kelemahan sistem pengendalian internal, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, maupun permasalahan administrasi dan pengelolaan keuangan daerah [6]. Semakin banyak jumlah temuan audit yang ditemukan dalam pemeriksaan menunjukkan semakin besar kemungkinan terdapat kelemahan dalam proses pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko salah saji material dalam laporan keuangan sehingga berpotensi memengaruhi pemberian opini audit oleh BPK [9]. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa temuan audit memiliki pengaruh terhadap opini audit pemerintah daerah karena temuan menggambarkan tingkat kepatuhan dan efektivitas pengendalian internal pemerintah daerah [9].

Selain jumlah temuan audit, permasalahan kerugian daerah menjadi aspek penting yang dapat memengaruhi kualitas opini audit pemerintah daerah. Kerugian daerah menunjukkan adanya pengurangan kekayaan daerah yang disebabkan oleh tindakan melawan hukum, kelalaian, atau ketidakpatuhan dalam pengelolaan keuangan daerah [10]. Keberadaan kasus kerugian daerah menjadi perhatian auditor karena dapat menunjukkan lemahnya pengawasan, pengendalian internal, serta kepatuhan aparatur pemerintah terhadap ketentuan pengelolaan keuangan publik [11]. Jumlah kasus kerugian daerah menggambarkan frekuensi terjadinya permasalahan keuangan dalam suatu pemerintah daerah, sedangkan nilai kerugian menunjukkan besarnya dampak finansial yang ditimbulkan akibat permasalahan tersebut. Dampak kerugian terhadap opini perlu dinilai berdasarkan materialitas dan pengaruhnya terhadap penyajian laporan keuangan, bukan hanya frekuensi kasus atau nominal kerugian [8]. Auditor mempertimbangkan tingkat materialitas dan dampak permasalahan tersebut dalam menentukan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian sebelumnya menemukan bahwa temuan kepatuhan berpengaruh negatif signifikan terhadap opini audit, sedangkan penyelesaian kerugian daerah tidak berpengaruh signifikan [11]. Perbedaan tersebut menunjukkan perlunya membedakan jenis permasalahan dan indikator penyelesaiannya dalam analisis opini audit. Jumlah kasus kerugian dan nilai kerugian menjadi variabel penting yang perlu dikaji secara terpisah karena keduanya memiliki karakteristik pengukuran yang berbeda. Selain faktor permasalahan yang ditemukan auditor, kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan perbaikan melalui penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) juga menjadi faktor yang berpotensi memengaruhi opini audit. Tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk memperbaiki kelemahan yang ditemukan BPK, termasuk melakukan pengembalian kerugian daerah, memperbaiki sistem pengendalian internal, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku [6].

Tingkat penyelesaian TLRHP mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan. Pemerintah daerah yang memiliki tingkat penyelesaian rekomendasi pemeriksaan yang tinggi menunjukkan adanya respons positif terhadap hasil audit dan kemampuan memperbaiki kelemahan pengelolaan keuangan [9]. Namun, hubungan tersebut tidak selalu seragam karena terdapat penelitian sebelumnya yang tidak menemukan pengaruh signifikan tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap opini audit [11]. Provinsi Kalimantan Barat menjadi salah satu wilayah yang menarik untuk diteliti karena karakteristik pemerintah daerahnya terdiri atas satu pemerintah provinsi dan beberapa pemerintah kabupaten/kota dengan tingkat kompleksitas pengelolaan keuangan yang berbeda. Perbedaan kapasitas fiskal, struktur organisasi, kualitas sumber daya manusia, serta sistem pengendalian internal antar pemerintah daerah dapat menyebabkan variasi dalam jumlah temuan audit, kasus kerugian daerah, nilai

kerugian, dan tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi opini audit pemerintah daerah. Sebagian besar penelitian masih berfokus pada variabel temuan audit dan tindak lanjut hasil pemeriksaan secara umum [9], [11]. Penelitian yang secara khusus memisahkan pengaruh jumlah kasus kerugian daerah dan nilai kerugian daerah terhadap opini audit pemerintah daerah masih relatif terbatas. Padahal, kedua variabel tersebut memiliki karakteristik berbeda, dimana jumlah kasus menggambarkan frekuensi permasalahan sedangkan nilai kerugian menggambarkan tingkat materialitas dampak keuangan. Berdasarkan adanya kesenjangan penelitian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh temuan audit, jumlah kasus kerugian, nilai kerugian, dan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap opini audit pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian akuntansi sektor publik serta memberikan manfaat praktis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan mempertahankan opini audit yang lebih baik.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatori untuk menguji hubungan statistik antara temuan audit, jumlah kasus kerugian, nilai kerugian daerah, dan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dengan opini audit pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Barat. Pendekatan kuantitatif memungkinkan pengujian hipotesis menggunakan data numerik dan analisis statistik [12]. Desain eksplanatori digunakan untuk menelaah hubungan antarvariabel berdasarkan kerangka konseptual dan bukti empiris, dengan tetap memperhatikan bahwa analisis data observasional tidak dengan sendirinya membuktikan hubungan sebab akibat [13].

Data penelitian merupakan data sekunder yang bersumber dari laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. *Dataset* yang dianalisis mencakup 120 observasi pada pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Barat. Informasi yang digunakan meliputi opini audit sebagai variabel dependen (Y), serta temuan audit (X1), jumlah kasus kerugian (X2), nilai kerugian daerah (X3), dan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (X4) sebagai variabel independen. Data dikumpulkan melalui dokumentasi laporan pemeriksaan dan disusun menurut variabel penelitian. Jumlah 120 menunjukkan banyaknya observasi yang dianalisis, bukan jumlah pemerintah daerah yang berbeda.

Analisis data menggunakan regresi linear berganda dengan persamaan (1).

$$Y = \alpha + \beta 1X1 + \beta 2X2 + \beta 3X3 + \beta 4X4 + \varepsilon \quad (1)$$

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi setiap variabel. Evaluasi asumsi model meliputi uji normalitas residual Kolmogorov–Smirnov, multikolinearitas melalui *tolerance* dan *variance inflation factor*, heteroskedastisitas melalui regresi nilai absolut residual, serta autokorelasi menggunakan statistik Durbin–Watson. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t untuk hubungan parsial dan uji F untuk signifikansi model secara simultan pada taraf 0,05. Koefisien determinasi dan koefisien determinasi yang disesuaikan digunakan untuk menilai kemampuan penjelasan model, sedangkan koefisien regresi diinterpretasikan bersama arah hubungan dan signifikansinya [14].

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Uji Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil statistik deskriptif terhadap 120 observasi, yang dapat dilihat pada Tabel 1, variabel Opini Audit (Y) memiliki nilai minimum 3, maksimum 4, rata-rata sebesar 3,83, dan standar deviasi 0,382. Variabel Temuan Audit (X1) memiliki nilai minimum 4, maksimum 23, rata-rata 11,02, dan standar deviasi 3,745. Variabel Jumlah Kasus Kerugian (X2) memiliki nilai minimum 0, maksimum 13, rata-rata 3,68, dan standar deviasi 2,345. Variabel Nilai Kerugian Daerah (X3) memiliki nilai minimum 0,0000, maksimum 23,88, rata-rata 20,39, dan standar deviasi 2,151. Selanjutnya, variabel TLRHP (X4) memiliki nilai minimum 0,00, maksimum 1,00, rata-rata 0,64, dan standar deviasi 0,259.

Tabel 1. Uji Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. *Deviation*
Opini Audit (Y)	120	3,00	4,00	3,83	0,382
Temuan Audit (X1)	120	4,00	23,00	11,02	3,745
Jumlah Kasus Kerugian (X2)	120	0,00	13,00	3,68	2,345
Nilai Kerugian Daerah (X3)	120	0,00	23,88	20,39	2,151
TLRHP (X4)	120	0,00	1,00	0,64	0,259
Valid N (*listwise*)	120				

3.2. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah nilai residual dalam model regresi memiliki distribusi normal atau tidak. Distribusi residual yang normal merupakan salah satu syarat penting dalam analisis regresi karena model regresi yang baik harus memiliki nilai residual yang mengikuti pola distribusi normal [14].

Berdasarkan hasil pengujian normalitas pada Tabel 2, diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-*tailed*) sebesar 0,200. Nilai tersebut lebih besar dibandingkan tingkat signifikansi 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa

residual model regresi telah berdistribusi normal. Model penelitian telah memenuhi asumsi normalitas dan dapat digunakan untuk analisis regresi selanjutnya.

Tabel 2. Uji Normalitas *One-Sample* Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov *Test*		
		Unstandardized Residual
N		120
Normal Parameters[a,b]	*Mean*	-0,36183660
	Std. *Deviation*	1,07522733
Most Extreme Differences	*Absolute*	0,07100000
	Positive	0,05300000
	Negative	-0,07100000
Test Statistic		0,07100000
Asymp. Sig. (2-*tailed*)[c]		0,20000000

3.3. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan korelasi yang tinggi antarvariabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak memiliki korelasi yang kuat antarvariabel bebas karena kondisi tersebut dapat menyebabkan ketidakakuratan dalam mengestimasi nilai koefisien regresi [15]. Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 3, seluruh variabel independen memiliki nilai VIF kurang dari 10 dan nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10. Variabel temuan audit memiliki nilai VIF sebesar 1,630, jumlah kasus kerugian sebesar 1,817, nilai kerugian daerah sebesar 1,293, dan TLRHP sebesar 1,088.

Tabel 3. Uji Multikolinearitas

Coefficients[a]		
Model	*Collinearity Statistics*	
	Tolerance	VIF
(*Constant*)		
Temuan Audit (X1)	0,614	1,630
Jumlah Kasus Kerugian (X2)	0,550	1,817
Nilai Kerugian Daerah (X3)	0,773	1,293
TLRHP (X4)	0,920	1,088

3.4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya dalam model regresi. Model regresi yang baik harus memiliki kondisi homoskedastisitas, yaitu varians residual yang tetap atau tidak mengalami perubahan pada setiap nilai prediksi variabel independen [15]. Hasil pengujian pada Tabel 4 menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Variabel temuan audit memiliki nilai signifikansi sebesar 0,060, jumlah kasus kerugian sebesar 0,067, nilai kerugian daerah sebesar 0,839, dan TLRHP sebesar 0,872.

Tabel 4. Uji Heteroskedastisitas

Model	*Unstandardized Coefficients*		*Standardized Coefficients*	t	Sig.
	B	Std. *Error*	Beta		
(*Constant*)	0,974	0,706		1,379	0,170
Temuan Audit (X1)	-0,042	0,022	-0,221	-1,903	0,060
Jumlah Kasus Kerugian (X2)	0,069	0,037	0,227	1,846	0,067
Nilai Kerugian Daerah (X3)	0,007	0,034	0,021	0,203	0,839
TLRHP (X4)	-0,042	0,262	-0,015	-0,162	0,872

a. *Dependent Variable*: abs_res

3.5. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara residual pada satu periode pengamatan dengan residual pada periode pengamatan lainnya. Autokorelasi sering muncul pada data runtut waktu (*time series*) karena adanya keterkaitan antarperiode pengamatan. Model regresi yang baik harus terbebas dari masalah autokorelasi agar hasil estimasi tidak mengalami bias [14].

Hasil pengujian menunjukkan nilai Durbin-Watson sebesar 1,775, dengan nilai DL sebesar 1,6303 dan DU sebesar 1,7702. Nilai DW lebih besar dari DU sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami masalah autokorelasi. Dengan terpenuhinya seluruh pengujian asumsi klasik, yaitu residual berdistribusi normal, tidak terdapat multikolinearitas, tidak terjadi heteroskedastisitas, dan tidak terdapat autokorelasi. Maka, model regresi dalam penelitian ini layak digunakan untuk menguji pengaruh temuan audit, jumlah kasus kerugian, nilai kerugian daerah, dan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap opini audit pemerintah daerah.

Tabel 5. Uji Autokorelasi

R	R *Square*	*Adjusted* R *Square*	Std. *Error of the Estimate*	*Durbin-Watson*
0,346[a]	0,120	0,089	0,364	1,775

3.6. Uji Persamaan Regresi

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui arah dan besarnya pengaruh beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen. Dalam penelitian ini, analisis regresi digunakan untuk menguji pengaruh temuan audit (X1), jumlah kasus kerugian (X2), nilai kerugian daerah (X3), dan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (X4) terhadap opini audit pemerintah daerah (Y). Analisis regresi dilakukan setelah model penelitian memenuhi seluruh pengujian asumsi klasik

sehingga hasil estimasi yang diperoleh dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antarvariabel penelitian [14].

Berdasarkan Tabel 6, Temuan audit (X1), Jumlah Kasus Kerugian (X2), Nilai Kerugian Daerah (X3), dan TLRHP (X4) memiliki koefisien negatif yang menunjukkan arah hubungan negatif terhadap opini audit pemerintah daerah. Koefisien regresi masing-masing variabel sebesar -0,013, -0,021, -0,006, dan -0,375, yang berarti setiap peningkatan variabel independen secara teoritis akan diikuti penurunan nilai opini audit dengan asumsi variabel lain konstan. Namun, pengaruh masing-masing variabel ditentukan berdasarkan hasil pengujian signifikansi. Interpretasi koefisien regresi harus mempertimbangkan tingkat signifikansi statistik untuk memastikan apakah hubungan antarvariabel benar-benar berpengaruh atau hanya terjadi akibat variasi sampel penelitian [14].

Tabel 6. Uji Persamaan Regresi

Coefficients[a]

Model	*Unstandardized Coefficients*		*Standardized Coefficients*	t	Sig.
	B	Std. *Error*	Beta		
(*Constant*)	4,404	0,361		12,186	0,000
Temuan Audit (X1)	-0,013	0,011	-0,126	-1,127	0,262
Jumlah Kasus Kerugian (X2)	-0,021	0,019	-0,127	-1,079	0,283
Nilai Kerugian Daerah (X3)	-0,006	0,018	-0,034	-0,339	0,735
TLRHP (X4)	-0,375	0,134	-0,255	-2,798	0,006

a. *Dependent Variable*: Opini Audit (Y)

3.7. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial maupun simultan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t, uji F, dan koefisien determinasi (R^2). Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara individual, sedangkan uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh seluruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen [14].

3.8. Uji t

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap opini audit pemerintah daerah. Dasar pengambilan keputusan dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 5% atau 0,05, [12]. Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 6, variabel temuan audit memiliki nilai signifikansi sebesar 0,262 > 0,05 dengan nilai koefisien regresi sebesar -0,013. Hasil tersebut menunjukkan bahwa temuan audit tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit pemerintah daerah sehingga hipotesis pertama (H1) ditolak.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa jumlah kasus kerugian memiliki nilai signifikansi sebesar 0,283 > 0,05 dengan koefisien regresi sebesar -0,021. Jumlah kasus kerugian tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit pemerintah daerah sehingga hipotesis kedua (H2) ditolak. Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai kerugian daerah memiliki nilai signifikansi sebesar 0,735 > 0,05 dengan koefisien regresi sebesar -0,006. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai kerugian daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit pemerintah daerah sehingga hipotesis ketiga (H3) ditolak.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel TLRHP memiliki nilai signifikansi sebesar 0,006 < 0,05 dengan koefisien regresi sebesar -0,375. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan berpengaruh signifikan terhadap opini audit pemerintah daerah sehingga hipotesis keempat (H4) diterima.

3.9. Uji F

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi dengan tingkat kesalahan penelitian sebesar 5%, [14]. Berdasarkan hasil uji F diperoleh pada Tabel 7, dimana SoS adalah *sum of squares* dan MS adalah *mean square*, nilai signifikansi sebesar 0,005 < 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel temuan audit, jumlah kasus kerugian, nilai kerugian daerah, dan TLRHP secara simultan berpengaruh signifikan terhadap opini audit pemerintah daerah.

Tabel 7. Uji F

ANOVA[a]

Model	*SOS*	df	*MS*	F	Sig.
Regression	2,075	4	0,519	3,911	0,005
Residual	15,250	115	0,133		
Total	17,325	119			

3.10. Uji R

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi perubahan variabel dependen. Semakin besar nilai R^2 maka semakin besar kemampuan model penelitian dalam menjelaskan variabel dependen [15]. Hasil pengujian pada Tabel 5 menunjukkan nilai R yaitu 0,346, R Square sebesar 0,120, dan *Adjusted* R *Square* sebesar 0,089 dengan std. *error of the estimate* sebesar 0,364. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel temuan audit, jumlah kasus kerugian, nilai kerugian

daerah, dan TLRHP mampu menjelaskan variasi opini audit pemerintah daerah sebesar 12%, sedangkan sisanya sebesar 88% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian.

3.11. Pengaruh Temuan Audit terhadap Opini Audit Pemerintah Daerah

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel temuan audit tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit pemerintah daerah. Hipotesis pertama yang menyatakan bahwa temuan audit berpengaruh terhadap opini audit pemerintah daerah ditolak. Temuan audit merupakan hasil identifikasi auditor terhadap kelemahan sistem pengendalian internal maupun ketidakpatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan perundang-undangan selama proses pemeriksaan laporan keuangan. Keberadaan temuan audit menunjukkan adanya aspek yang perlu diperbaiki dalam pengelolaan keuangan daerah, namun tidak seluruh temuan secara langsung memengaruhi pemberian opini audit. Auditor dalam memberikan opini tidak hanya mempertimbangkan jumlah temuan, tetapi juga mempertimbangkan tingkat materialitas, dampak terhadap kewajaran laporan keuangan, serta kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) [8].

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa banyaknya temuan audit yang diperoleh pemerintah daerah belum tentu menyebabkan penurunan opini audit. Kondisi tersebut dapat terjadi karena sebagian temuan yang ditemukan oleh auditor bersifat administratif atau telah dilakukan perbaikan oleh pemerintah daerah sebelum laporan hasil pemeriksaan diterbitkan. Jumlah temuan audit belum sepenuhnya menggambarkan rendahnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan perspektif teori keagenan (*agency theory*), pemerintah daerah sebagai agen memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya publik kepada masyarakat sebagai prinsipal. Mekanisme audit yang dilakukan oleh BPK berfungsi sebagai alat pengawasan untuk mengurangi asimetri informasi antara pemerintah dan masyarakat. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan temuan audit saja belum cukup menjelaskan perubahan opini audit apabila temuan tersebut tidak berdampak material terhadap laporan keuangan [16]. Hasil ini berbeda dengan penelitian yang menemukan pengaruh temuan audit terhadap opini [9], [17]. Perbedaan objek penelitian dan pengelompokan temuan perlu dipertimbangkan ketika membandingkan hasil tersebut.

3.12. Pengaruh Jumlah Kasus Kerugian terhadap Opini Audit Pemerintah Daerah

Hasil pengujian menunjukkan bahwa jumlah kasus kerugian tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit pemerintah daerah. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis kedua yang menyatakan jumlah kasus kerugian berpengaruh terhadap opini audit pemerintah daerah ditolak. Jumlah kasus kerugian menggambarkan frekuensi terjadinya permasalahan keuangan daerah yang ditemukan dalam pemeriksaan BPK. Semakin banyak kasus kerugian yang ditemukan menunjukkan adanya potensi kelemahan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa frekuensi kasus kerugian belum mampu menjelaskan perubahan opini audit. Hal tersebut dapat terjadi karena auditor tidak menentukan opini hanya berdasarkan jumlah kasus kerugian, melainkan berdasarkan tingkat kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Suatu pemerintah daerah masih dapat memperoleh opini audit yang baik apabila kasus kerugian yang ditemukan tidak bersifat material, telah diungkapkan secara memadai, serta telah dilakukan tindak lanjut sesuai rekomendasi auditor [8].

Pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah, opini audit diberikan berdasarkan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi, kecukupan pengungkapan informasi, kepatuhan terhadap peraturan, dan efektivitas pengendalian internal. Jumlah kasus kerugian yang tinggi tidak secara otomatis menyebabkan perubahan opini apabila tidak memengaruhi kewajaran laporan keuangan secara material [5]. Penelitian sebelumnya juga menemukan hasil tidak signifikan untuk penyelesaian kerugian daerah [11]. Namun, indikator tersebut berbeda dari jumlah kasus kerugian, sehingga temuannya tidak dapat diperlakukan sebagai bukti langsung untuk hubungan yang diuji dalam penelitian ini.

3.13. Pengaruh Nilai Kerugian Daerah terhadap Opini Audit Pemerintah Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai kerugian daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit pemerintah daerah. Hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa nilai kerugian daerah berpengaruh terhadap opini audit pemerintah daerah ditolak.

Nilai kerugian daerah menggambarkan besarnya potensi kehilangan sumber daya keuangan pemerintah akibat adanya penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam pengelolaan anggaran. Secara teoritis, semakin besar nilai kerugian daerah maka semakin besar pula risiko terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa besarnya nilai kerugian belum menjadi faktor utama yang menentukan opini audit. Hal tersebut menunjukkan bahwa auditor mempertimbangkan aspek materialitas dalam menentukan opini. Nilai kerugian yang besar secara nominal belum tentu menyebabkan laporan keuangan menjadi tidak wajar apabila telah diungkapkan dengan benar, telah dilakukan koreksi, atau tidak memengaruhi keseluruhan penyajian laporan keuangan. Sebaliknya, nilai kerugian yang lebih kecil dapat menjadi perhatian auditor apabila berdampak langsung terhadap akun-akun penting dalam laporan keuangan [8].

Hasil tidak signifikan pada nilai kerugian daerah perlu ditafsirkan secara terbatas: model belum memberikan bukti statistik yang cukup mengenai hubungan variabel tersebut dengan opini audit. Penelitian menemukan bahwa penyelesaian kerugian daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit, tetapi variabel itu mengukur penyelesaian, bukan besarnya nilai kerugian [11]. Kesamaan hasil tidak signifikan tersebut tidak menunjukkan bahwa kedua penelitian menguji hubungan yang identik. Materialitas tetap menjadi pertimbangan konseptual dalam evaluasi dampak permasalahan terhadap laporan keuangan [8].

3.14. Pengaruh Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan terhadap Opini Audit Pemerintah Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) berpengaruh signifikan terhadap opini audit pemerintah daerah. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis keempat diterima, sehingga penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan memiliki pengaruh terhadap opini audit pemerintah daerah. Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan merupakan bentuk respons pemerintah daerah terhadap kelemahan yang ditemukan auditor. Tingkat penyelesaian tindak lanjut mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam memperbaiki sistem pengendalian internal, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, serta memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan daerah [6].

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses perbaikan setelah pemeriksaan memiliki peran penting dalam menentukan kualitas opini audit. Pemerintah daerah yang mampu menindaklanjuti rekomendasi auditor menunjukkan adanya komitmen terhadap peningkatan akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik. Arah koefisien regresi yang bernilai negatif menunjukkan bahwa hubungan statistik antara TLRHP dan opini audit dalam model penelitian ini memiliki arah negatif. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh karakteristik data penelitian, di mana pemerintah daerah dengan jumlah rekomendasi pemeriksaan yang lebih banyak memiliki ruang perbaikan yang lebih besar sehingga tingkat penyelesaian tindak lanjut dapat menunjukkan adanya permasalahan pemeriksaan yang sebelumnya lebih kompleks.

Dalam perspektif teori keagenan, tindak lanjut rekomendasi audit merupakan mekanisme pengendalian yang membantu memastikan bahwa pemerintah daerah sebagai agen menjalankan tanggung jawab pengelolaan sumber daya publik sesuai dengan harapan masyarakat sebagai prinsipal. Penyelesaian rekomendasi menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam mengurangi risiko penyimpangan dan meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan [16]. Penelitian sebelumnya menemukan pengaruh positif signifikan tindak lanjut terhadap opini audit, sedangkan hubungan dalam penelitian ini berarah negatif [9]. Penelitian berbeda melaporkan hasil tidak signifikan [11]. Bukti empiris mengenai tindak lanjut belum seragam; perbedaan arah dan signifikansi perlu dibahas dengan mempertimbangkan pengukuran serta konteks penelitian.

3.15. Pengaruh Temuan Audit, Jumlah Kasus Kerugian, Nilai Kerugian Daerah, dan Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Secara Simultan terhadap Opini Audit Pemerintah Daerah

Hasil uji simultan (uji F) menunjukkan bahwa variabel temuan audit, jumlah kasus kerugian, nilai kerugian daerah, dan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap opini audit pemerintah daerah. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,005 < 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa opini audit pemerintah daerah tidak hanya dipengaruhi oleh satu aspek tertentu, tetapi merupakan hasil evaluasi auditor terhadap berbagai aspek pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan. Temuan pemeriksaan, permasalahan kerugian daerah, serta kemampuan pemerintah daerah dalam menyelesaikan rekomendasi menjadi bagian dari informasi yang digunakan dalam menilai kualitas laporan keuangan.

Nilai koefisien determinasi (R *Square*) sebesar 0,120 menunjukkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini mampu menjelaskan variasi opini audit sebesar 12%, sedangkan sebesar 88% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Faktor lain tersebut dapat berkaitan dengan kualitas sistem pengendalian internal, penerapan standar akuntansi pemerintahan, kompetensi aparatur, serta efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh temuan audit, jumlah kasus kerugian, nilai kerugian daerah, dan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap opini audit pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Barat, dapat disimpulkan bahwa temuan audit, jumlah kasus kerugian, dan nilai kerugian daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa opini audit tidak hanya ditentukan oleh jumlah maupun nilai permasalahan yang ditemukan, tetapi juga mempertimbangkan tingkat materialitas, dampak terhadap laporan keuangan, dan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan pemerintah daerah. Sementara itu, penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) berpengaruh signifikan terhadap opini audit, yang menunjukkan pentingnya komitmen pemerintah daerah dalam memperbaiki kelemahan pengelolaan keuangan. Secara simultan, seluruh variabel penelitian berpengaruh signifikan terhadap opini audit pemerintah daerah, meskipun masih terdapat faktor lain di luar model penelitian yang dapat memengaruhi opini audit, seperti sistem pengendalian

internal, kompetensi aparatur, dan tata kelola keuangan daerah.

Daftar Rujukan

[1] Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Andi.

[2] Mahmudi, M. (2019). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

[3] Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Jakarta: Salemba Empat.

[4] Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. *European Law Journal, 13*(4), 447–468. https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x

[5] Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*. BPK. Retrieved from https://peraturan.bpk.go.id/Details/40509/uu-no-15-tahun-2004

[6] Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Ikhtisar hasil pemeriksaan semester I tahun 2024*. BPK. Retrieved from https://www.bpk.go.id/assets/files/ihps/2024/I/ihps_i_2024_1729583557.pdf

[7] Setyaningrum, D., & Syafitri, F. (2012). Analisis pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 9*(2), 154–170. https://doi.org/10.21002/jaki.2012.10

[8] Arens, A. A., Elder, R. J., Beasley, M. S., & Hogan, C. E. (2020). *Auditing and assurance services: An integrated approach* (17th ed.). Pearson.

[9] Amyulianthy, R., Anto, A. S. U., & Budi, S. (2020). Temuan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap opini audit (studi pada pemerintah provinsi di Indonesia). *Jurnal Penelitian Akuntansi, 1*(1), 14–27. https://doi.org/10.19166/jpa.v1i1.2409

[10] Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain*. BPK. https://peraturan.bpk.go.id/Details/5759/pp-no-38-tahun-2016

[11] Valentina, J. (2022). Pengaruh temuan SPI, temuan kepatuhan, tindak lanjut hasil pemeriksaan dan penyelesaian kerugian daerah terhadap opini audit di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan. *Syntax Idea, 4*(6), 951–970. https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v4i6.1867

[12] Sugiyono, S. (2022). *Metode penelitian kuantitatif*. Alfabeta.

[13] Bougie, R., & Sekaran, U. (2019). *Research methods for business: A skill-building approach* (8th ed.). Wiley.

[14] Ghozali, I. (2021). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 26* (10th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

[15] Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic econometrics* (5th ed.). McGraw-Hill/Irwin.

[16] Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics, 3*(4), 305–360. https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X

[17] Siregar, M. I., & Rudiansyah, J. (2019). Pengaruh jumlah temuan audit terhadap opini audit kabupaten/kota se-Sumatera. *Jurnal Ecoment Global, 4*(1), 101–124. https://doi.org/10.35908/jeg.v4i1.576